PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sep | Okt | Nov | Des | 2015 | Hal. : 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31

2.413 Rekomendasi Belum Ditindaklanjuti

PONTIANAK - Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan Kalbar Didi Budi Satrio menyatakan, penyelesaian tindak lanjut temuan dan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan, serta kerugian negara atau daerah di Kalbar cukup rendah. Hingga semester I 2015, sebanyak 2.413 rekomendasi atau 29,56 persen tindak lanjut belum sesuai rekomendasi.

"Jumlah tindak lanjut belum sesuai rekomendasi ini meningkat 7,53 persen dari periode sebelumnya," ujar Didi ketika menyerahkan hasil rekomendasi tindak lanjut temuan dan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK RI, serta kerugian negara atau daerah kepada Pemprov Kalbar, Pemkot Pontianak, Pemkab Kubu Raya, Ketapang, Mempawah, dan Kayong Utara, Selasa (15/9) di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar.

> **"Sebanyak 32 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Jumlah ini tidak berubah dari semester lalu"**
>
> **Didi Budi Satrio**

Secara rinci Didi menjelaskan, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar telah menghasilkan 3.711 temuan hingga semester I tahun 2015, atau mengalami penambahan sebanyak 130 temuan dari pemeriksaan semester II tahun 2014. Rekomendasi yang dihasilkan sebanyak 8.163 rekomendasi atau mengalami penambahan 394 rekomendasi. Penambahan jumlah temuan dan rekomendasi tersebut berasal dari laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerag tahun 2014.

◆*Ke Halaman 19 kolom 1*

PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sep | Okt | Nov | Des | 2015 | Hal. : 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31

2.413 Rekomendasi Belum Ditindaklanjuti

Sambungan dari halaman 13

Dari jumlah rekomendasi yang diberikan tersebut, sebanyak 5.453 rekomendasi atau 66,80 persen tindak lanjut sesuai rekomendasi. Tetapi penyelesaian rekomendasi ini tidak sesuai diikuti dengan penurunan jumlah status tindak lanjut belum sesuai rekomendasi, yang jumlahnya meningkat 7,53 persen. Sebanyak 265 rekomendasi atau 3,25 persen belum ditindaklanjuti. Jumlah yang belum ditindaklanjuti ini turun dibandingkan semester lalu yang sebanyak 239 rekomendasi.

"Sebanyak 32 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Jumlah ini tidak berubah dari semester lalu," ungkap Didi.

Didi menjelaskan dari hasil rekapitulasi tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, telah dilakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atau daerah sebesar Rp189,86 miliar. Jumlah ini naik 5,64 persen.

Khusus enam pemerintah daerah yang telah diserahkan laporan hasil pemantauan temuan dan rekomendasi, serta pemantauan hasil kerugian negara, Didi menyebutkan terdapat 3.599 rekomendasi atau 44,09 persen dari total keseluruhan rekomendasi pada pemerintah daerah di Kalbar.

Penyelesaian tindak lanjut sudah dilakukan masing-masing daerah. Pada Pemprov Kalbar terdapat 863 rekomendasi atau 67,79 persen tindaklanjut sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 381 rekomendasi atau 29,93 tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi. Empat rekomendasi atau 0,31 persen belum ditindaklanjuti, serta 25 rekomendasi atau 1,96 persen tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Pada Pemkor Pontianak terdapat 470 rekomendasi atau 68,51 persen tindaklanjut sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 208 rekomendasi atau 30,32 persen tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi. Enam rekomendasi atau 0,87 persen belum ditindaklanjuti, serta 2 rekomendasi atau 0,25 persen tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Di Pemkab Kubu Raya terdapat 139 rekomendasi atau 51,87 persen tindaklanjut sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 123 rekomendasi atau 45,90 persen tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, serta 6 rekomendasi atau 2,24 persen belum ditindaklanjuti.

Di Kabupaten Mempawah terdapat 351 rekomendasi atau 77,31 persen tindaklanjut sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 89 rekomendasi atau 19,60 tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi. Sembilan rekomendasi atau 1,98 persen belum ditindaklanjuti, serta lima rekomendasi atau 1,10 persen tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Di Kabupaten Ketapang terdapat 310 rekomendasi atau 50,49 persen tindaklanjut sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 218 rekomendasi atau 35,5 tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, serta 86 rekomendasi atau 14.01 persen belum ditindaklanjuti.

Di Kayong Utara 192 rekomendasi atau 63,16 persen tindaklanjut sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 107 rekomendasi atau 35,20 tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, serta lima rekomendasi atau 1,64 persen belum ditindaklanjuti.

Didi menyatakan penyelesaian tindak lanjut dan kerugian negara atau daerah pada pemerintah daerah di Kalbar cukup rendah. Dikarenakan aparat pemerintah daerah belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sesuai dengan ketentuan berlaku. Penyebab lainnya, dokumen pendukung tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan entitas belum membuktikan adanya penyelesaian atas temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi.

Didi mengungkapkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK ini disampaikan oleh pejabat kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) diterima. "Berkaitan dengan masalah ini, BPK berharap SKPD yang menjadi muara temuan dan rekomendasi, segera menindaklanjutinya," minta Didi.

Jika tidak, lanjut Didi, peraturan BPK RI masih membolehkan perpanjangan waktu. Artinya jika tindak lanjut itu menemukan kesulitan dan ada solusinya, BPK RI memberikan waktu selama 30 hari untuk mendiskusikannya. Jika ada solusinya, diberikan waktu lagi selama 30 hari.

"Total perpanjangannya sampai 150 hari. Kalau sampai 150 hari SKPD maupun orang yang harus mengembalikan uang tidak menindaklanjutinya, BPK akan menyerahkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum," kata Didi.

Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan pihaknya segera mengumpulkan kepala SKPD yang belum menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari BPK RI.

"Kami akan tanya, masalahnya apa. Jika pemahaman antara SKPD dan BPK RI belum ketemu, bisa konsultasi," kata Christiandy, kemarin.

Ia menegaskan tak ada tempat bagi oknum pegawai yang nakal dan korupsi. Selama ini aturan main dalam menjalankan pemerintahan sangat jelas. Semuanya harus berdasarkan peraturan yang berlaku.

"Provinsi harus menjadi contoh yang baik. Kalau memang niatnya baik, seharusnya ada solusinya," ungkap Christiandy. ***(uni)***